

POLITISASI PESANTREN DAN PERGESERAN FUNGSI PESANTREN DI MADURA

Merlia Indah Prastiwi

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69162

e-mail: merlia_842003@yahoo.com

Abstrak:

Di Madura, pesantren dan kiai menjadi urat nadi masyarakat Madura. Menjadi kiai di Madura memiliki citra tersendiri. Tak pelak, akhirnya kiai di Madura mempunyai banyak massa dan pengikut, yang pada akhirnya ranah kepercayaan terhadap kiai beralih fungsi dari hal yang bersifat agamis menjadi politis. Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren sebagai pusat kajian keagamaan mengalami pergeseran fungsi, dari peran yang bersifat agamis menjadi bernuansa politis. Dengan menjadikan pesantren di Madura, tepatnya di tiga kabupaten (Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep) sebagai sampel, peneliti menemukan respons yang beragam dari pergeseran fungsi ini. Secara umum, respons masyarakat mendukung keterlibatan kiai dalam politik, meskipun ada sebagian yang menyoal keterlibatan kiai dalam ranah politik. Kenyataan ini bisa dipahami lantaran masyarakat Madura masih memosisikan kiai sebagai figur dan teladan utama, sehingga keterlibatan kiai dalam politik diharapkan dapat mengubah citra buruk politik.

Abstract:

In Madura, *pesantren* and *kiai* become the lifeblood of the Madurese. Being a *kiai* has its own image in Madura. Inevitably, in Madura they have a lot of mass and followers, which in turn the realms of belief in *kiai* switch from that of the religious to political nuances in nature. This paper examines how the function of *pesantren* as a center for religious studies has shifted, from the role of *pesantren* which is religious nuances to that of more political nuances. From the sample of *pesantren* in Madura, precisely in three districts (Bangkalan, Pamekasan, and Sumenep) the study found various responses of the function shift of *pesantren*. In general, although there are some who question *kiai* involvement in the political sphere, the vast majority of the community supports *kiai's* involvement in politics. This fact can be understood because Madurese still position *kiai* as a major figure and model, thus the involvement of *kiai* in politics is expected to change the negative image of politics.

Kata-kata Kunci:

Pesantren, kiai, politik, dakwah, Madura

Pendahuluan

Masyarakat Madura pada umumnya menjadikan pesantren sebagai pilihan utama tempat pendidikan putra-put-

rinya di samping sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, serta meminta nasihat dan doa guna mengatasi problem hidup. Ketaatan dan kehormatan masyarakat

Madura terhadap pimpinan pesantren sangat tinggi. Ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Madura yang memosisikan guru, ulama, kiai, atau pimpinan pesantren dalam urutan kedua setelah penghormatan terhadap kedua orang tua mereka. Falsafah hidup masyarakat Madura yang dimaksud adalah, "*bhappa'*, *bhabhu'*, *ghuru*, *rato*" (ayah, ibu, guru, dan raja).

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai dan mempunyai asrama sebagai tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini biasanya dikelilingi tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Belajar tentang Madura, sama halnya belajar tentang pesantren. Kehidupan yang sarat akan sendi-sendi Islam sangat lekat pada masyarakat pulau garam ini. Bahkan, sebagian masyarakatnya mewajibkan kepada seluruh keturunan dan sanak saudaranya untuk menuntut ilmu di pesantren ketimbang di 'sekolah umum'. Pesantren dianggap lebih sesuai untuk mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang shalih dan shalihah. Tidak heran bila jumlah pesantren di Madura menunjukkan jumlah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Banyak santri-santri lulusan pesantren yang lulus dan menjadi pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya.

Falsafah hidup masyarakat Madura ini kemudian berimplikasi pada peran pesantren, khususnya kiai dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Madura. Kiai merupakan guru, orang tua, dan juga ulama yang wajib dihormati dan disegani karena mereka memberikan ilmu, pembelajaran, dan nasihat. Dalam kehidupan di Madura, kiai memegang peranan sangat penting karena merupakan tokoh yang menjadi panutan. Hegemoni kiai yang luar biasa terhadap santri dan masyarakat sekitar terkadang memberikan implikasi non logis bagi masyarakat. Apa pun perkataan kiai selalu dianggap benar; apa pun yang diperintah kiai selalu dianggap bertujuan untuk kebaikan dunia akhirat; apa pun yang dilakukan kiai jauh dari unsur salah.

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Seringkali ia adalah pendiri pesantren itu sendiri. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadinya. Istilah kiai di Indonesia tidak hanya mengandung muatan makna ahli agama, tetapi juga memiliki muatan sosiologis-antropologis. Ketokohan kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik tapi individu kiai sendiri merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis.²

Posisi kiai tidak lagi semata sebagai pemimpin formal pesantren melainkan pemimpin informal (*informal leaders*) yang bertugas memberdayakan masyarakat Madura. Kiai juga berfungsi sebagai

¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 18.

²Hamdan Farhan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 65.

moral force yang turut memberikan kesadaran normatif kepada masyarakatnya.

Adapun ulama atau kiai juga memiliki tempat yang spesifik dalam masyarakat Madura, tidak hanya karena proses historis, tetapi juga didukung oleh kondisi-kondisi ekologi (tegal) dan struktur pemukiman penduduk yang ada. Hubungan antara kiai dan umatnya sangat dekat, dan kiai memiliki peran dominan dalam kehidupan umatnya. Apa yang dikatakan oleh kiai niscaya akan diikuti oleh umatnya bahkan kadang-kadang tanpa memperhitungkan apakah hal itu baik atau tidak. Dalam masyarakat Madura, kiai paling dihormati dibandingkan golongan sosial yang lain.

Pesantren yang dulunya lekat dengan berbagai bentuk pengajaran norma, sekarang mulai berubah menjadi ajang kampanye. Hampir mayoritas kiai dalam pesantren menjadi bagian dalam partai politik dan mengusung mereka sebagai calon kuat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena yang seperti ini sempat menunjukkan perbedaan persepsi dalam masyarakat yang menunjukkan pro dan kontra.

Ada dua pandangan yang terus mengalami perdebatan tentang di wilayah mana kiai seharusnya memainkan peran hegemoninya dalam hubungannya dengan politik praktis. Pandangan pertama menganggap peranan itu harus dimainkan di luar pagar politik praktis, yaitu peran *high politics*. Alasannya, terkait dengan posisi kiai yang semestinya mentransendensikan dirinya di atas semua kelompok, di samping wajah dunia politik negeri ini yang lebih banyak menampilkan borok busuk. Kiai sebagai tokoh panutan seharusnya berdiri di atas semua kekuatan politik, tidak memihak

pada satu kekuatan politik tertentu. Peran ini akan sirna manakala kiai sudah berpihak pada kubu-kubu tertentu dalam kekuatan politik.

Pandangan yang kedua berada pada posisi sebaliknya. Menurut pengikut pandangan ini, justru karena dunia politik praktis yang selama ini dianggap kotor maka ia perlu dibenahi dan diluruskan. Kiai sebagai sosok yang bersih, berilmu, dan bermoral berkewajiban untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara masuk ke dalamnya. Bukan hanya berdiri di luar pagar dan memberikan wejangan, namun memberikan contoh langsung bagaimana menjadi seorang politisi yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebaikan. Kewajiban ini juga tidak dapat dilepaskan dari status kiai sebagai pewaris Nabi.

Dalam banyak kasus, godaan politik di zaman sekarang sungguh besar akibat desentralisasi sistem pemerintahan yang memberikan peluang kepada organisasi keagamaan untuk ikut bermain dalam arena pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keterlibatan kiai dalam bidang politik ditandai dengan partisipasi mereka. Michael Rush dan Philip Althof menyebutkan bahwa partisipasi dalam bidang politik terdiri dari bentuk pasif dan aktif yang tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi politik hingga kepada memberi dukungan finansial dengan jalan membayar iuran keanggotaan.³ Partisipasi aktif para kiai dalam

³ Michael Rush & Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 128; lihat juga Khamami Zada, "NU, Politik, dan Khidmat Umat" dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kene-garaan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 63.

politik tentunya akan melahirkan implikasi tersendiri, baik kepada kiai, pesantren, santri, maupun masyarakat. Implikasi ini merupakan konsekwensi logis dari hukum sebab akibat. Berdasarkan uraian di atas, pengaruh kiai terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Madura, sangatlah kuat. Bahkan ada istilah yang berkembang di masyarakat Madura, seperti *ma' polé bhendher, sala bhei pagghun étoro' mon paréntana kéyaé* (jangankan benar, salah pun akan diikuti kalau itu perintah dari kiai). Hal ini mengindikasikan bahwa kiai berada pada posisi sentral dalam relasi struktur sosial di masyarakat.

Menurut Acep,⁴ fenomena kiai menjadi bagian dari politik sebenarnya tidak hanya di Madura. Sebut saja Zai-nuddin MZ, M Amien Rais, dan A.M Fatwa lebih banyak mengisi dan menghiasi dunia politik. Latar fenomena sosial politik saat ini sangat tepat untuk menawarkan konsep dan praktik politik yang sarat dengan nilai-nilai adiluhung manusia atau *ethic politic* (politik adiluhung).⁵

Antara dakwah dan politik terdapat daerah yang saling bersinggungan, di samping banyak perbedaan. Aktifitas dakwah sering berbau politik, demikian pula sebaliknya. Jika kurang jeli, sulit membedakannya. Politik oleh sebagian kalangan diartikan sebagai kemahiran untuk menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, mengawasi dan mengendalikan, dan mengguna-

kannya untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan lembaga-lembaga lainnya. Dari pengertian di atas tampak jelas bahwa orientasi politik adalah kekuasaan. Adapun dakwah adalah seruan kepada segenap manusia untuk mengikuti jalan Allah lewat *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Kekuasaan bisa saja menjadi alatnya, tapi sekali-kali, kekuasaan bukan merupakan tujuan dakwah. Istilah politik dan dakwah terasa oleh sebagian orang adalah dua hal yang sangat kontras. Dakwah adalah gerakan yang bernafaskan Islam yang mengajak manusia untuk *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*, sedangkan politik dari sebagian orang berpendapat tentang kekuasaan.

Di Madura, keterlibatan kiai dalam politik praktis menjadi gejala umum, di mana banyak kiai masuk dalam jajaran strategis di berbagai partai politik, baik PKB, PPP, PKS, PAN, dan partai politik yang lain. Hampir setiap perebutan kursi kekuasaan Pilkada di empat kabupaten di Madura selalu ada kiai yang mencalonkan diri. Misalnya, Kiai Busyro Karim yang terpilih menjadi Bupati Sumenep pada Pilkada Sumenep tahun 2010, menggantikan Kiai Ramdhan Siradj. Kiai Busyro Karim merupakan pengasuh Pesantren Al-Karimiyah, Gapura, Sumenep. Ia menengenyam pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain menjadi pemangku agama, ia juga menjabat sebagai salah satu pengurus cabang NU di Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Pamekasan tahun 2012, dua kandidat calon sama-sama dari kelompok kiai, yaitu Kiai Kholilurrahman dan Kiai Achmad Syafii. Sedangkan Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2012 dimenangkan

⁴ Acep Aripudin, *Sosiologi Dakwah* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

⁵ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung Membedakan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2001), hlm. 146.

oleh pasangan K. H. Fannan Hasib dan Fadhilah Budiono, dan di Kabupaten Bangkalan, Pilkada tahun 2012 dimenangkan oleh Kiai Makmun Ibnu Fuad yang merupakan putra dari Bupati Bangkalan sebelumnya, yaitu Kiai Fuad Amin Imron.

Perilaku politik kiai tersebut memiliki beberapa karakter. Di antaranya, sebagaimana diuraikan Muchlis Solichin,⁶ pertama, menjadikan santri sebagai agennya dengan kiai tertentu sebagai figur sentralnya. Upaya ini sangat efektif dilakukan mengingat para santri adalah pemuka-pemuka agama di masyarakat pada tingkat kampung, dusun, dan desa, sehingga pesan-pesannya dapat disampaikan dengan bahasa yang lugas dan dapat diterima oleh masyarakat awam. Di lain pihak, di kalangan santri terdapat keyakinan yang kental bahwa seorang santri tidak boleh berseberangan dengan kiaiinya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pilihan politik.

Kedua, mengusahakan dukungan dari para kerabat kiai yang umumnya merupakan tokoh ulama dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Para kerabat kiai yang mendukung itu umumnya memiliki visi dan pandangan yang sama atau pernah berguru di pesantren yang sama. Ketiga, dukungan dari kelompok kiai lain yang tidak termasuk kelompok lawan dan memiliki visi dan pandangan yang sama, yang bersumber dari kesamaan almamater dan lain-lain. Kiai-kiai inilah yang mempunyai andil besar dalam membesarkan kelompok tersebut

mengingat mereka juga mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat.

Gambaran di atas mendesakkan penulis untuk melihat bagaimana pesantren di bawah asuhan kiai telah beralih fungsi menjadi ajang kampanye. Bagaimana pergeseran fungsi pesantren di Madura itu terjadi, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap politisasi pesantren di Madura? Beberapa pertanyaan inilah yang hendak diurai dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 100 responden yang berasal dari 3 kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Pemilihan responden menggunakan metode *purposive sample*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan teknik pertanyaan tertutup, yang selanjutnya akan di-coding dan dianalisis. Untuk menambah kedalaman data yang diperoleh, peneliti mewawancarai beberapa pelaku sentral yang menjadi subjek penelitian, yaitu kiai.

Agama dan Politik: Memosisikan Kiai sebagai Sentral

Tipe relasi sosial antara kiai di Madura bagian barat (Bangkalan) dan kiai di Madura bagian timur (Pamekasan dan Sumenep) agak berbeda. Seluruh kiai di Bangkalan masih terikat dalam jaringan kekerabatan yang luas dengan ulama kharismatik di Jawa dan Madura, yakni Syaykhona Kholil. Ia adalah pendiri Pesantren Syaykhona Kholil di Bangkalan.

Sedangkan di Madura bagian timur, secara umum hubungan sosial antarkiai tidak diikat oleh jaringan kekerabatan yang luas seperti di Bangkalan. Hubungan antara kiai tidak bersifat hirar-

⁶ Mohammad Muchlis Sholichin, "Perilaku Politik Kiai di Pamekasan," *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. XV No. 1, (April 2009), hlm. 38.

kis. Masing-masing kiai memiliki otonomi, khususnya dalam hubungannya dengan jamaahnya dan dengan lembaga sosial lainnya, seperti birokrat dan anggota legislatif. Dalam struktur sosial, kiai memiliki pola hubungan yang dominan dengan umatnya.

Relasi antara santri dan kiai yang begitu dalam menyebabkan kiai di Madura berubah fungsi dalam mekanisme pemilihan calon pemimpin. Banyak tokoh pesantren yang memutuskan untuk mencalonkan diri dan berkompetisi di ranah politik dalam Pilkada. Tak pelak, hampir 90% dari hasil Pilkada dimenangkan oleh kiai.

Pemimpin keagamaan di Madura terdiri dari tiga kelompok, yaitu; kiai, santri, dan haji. Murid yang menuntut ilmu disebut santri; guru agama yang mengajari santri disebut kiai; dan mereka yang kembali dari menunaikan ibadah haji disebut haji. Ketiga kelompok tersebut berperan sebagai pemimpin keagamaan di masjid, acara ritual keagamaan dan acara seremonial lain, di mana mereka berperan sebagai pemimpinnya. Di antara ketiganya, kiai merupakan tokoh yang paling berpengaruh, sehingga oleh Kuntowijoyo, kiai Madura disebut dengan elit desa. Pengetahuan yang mendalam tentang Islam menjadikan mereka paling terdidik di desa. Beberapa kiai selain tetap menyampaikan keahliannya soal-soal agama, juga dapat meramalkan nasib, menyembuhkan orang sakit, dan mengajar olah kanuragan. Kiai Madura dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: *guru ngaji*, yang mengajarkan Al-Qur'an, *guru ngaji kitab* yang mengajarkan berbagai jenis ilmu agama, dan *guru tarekat* yang disebut juga pemimpin tarekat.

Secara politik, sah-sah saja seorang kiai menjabat sebagai bupati. Namun dalam perspektif Madura, munculnya bupati kiai seakan menyimpang dari koridor filosofi orang Madura. Sampai saat ini orang Madura tidak bisa melupakan ungkapan *bhuppa'- bhabhu'- ghuru - rato* yang menjadi panutan utama. Tugas dan peran kiai sebenarnya adalah sebagai penjaga moral masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan kewajibannya lebih berorientasi pada kehidupan *ukhrawi*. Sedangkan figur *rato* dalam tataran praktis bermakna sebagai pemimpin formal yang tugas dan kewajibannya lebih berorientasi pada kehidupan duniawi. Munculnya bupati kiai akan dipandang sebagai penyimpangan dari koridor filosofi kehidupan orang Madura, oleh karena secara kultural telah tegas ditentukan antara bidang kehidupan yang menjadi ranah otoritas kiai.

Identitas Responden

No	Identitas Responden	Persentase
1	Kiai	20%
2	Santri	40%
3	Masyarakat	40%
Jumlah		100%

Responden yang diwawancarai, berasal dari 3 elemen: santri, kiai, dan masyarakat umum. Perbandingan yang sama diberlakukan untuk santri dan masyarakat agar data yang diterima berimbang. Masyarakat yang tidak terpengaruh dengan kehidupan pesantren maupun yang terpengaruh pesantren di sekitar daerah pesantren mempunyai proporsi yang sama dengan santri yang langsung di bawah bimbingan kiai dalam pendidikan di pesantren. Kiai sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini hanya sebesar

20% saja untuk menghindari data yang normatif.

Lokasi Penelitian

No	Lokasi Penelitian	Persentase
1	Bangkalan	40%
2	Sumenep	30%
3	Pamekasan	30%
Jumlah		100%

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Dengan menggunakan 100 responden yang tersebar di 3 kabupaten tersebut, Bangkalan merupakan daerah dengan jumlah responden terbanyak. Hal ini memang menjadi tujuan awal peneliti melihat cikal bakal perpolitikan pesantren di Bangkalan yang menuai banyak sorotan dari publik nasional.

Peran Kiai dalam Pesantren

Peran Kiai dalam Pesantren	1. Membangun moral Santri	25%
	2. Mengajarkan Al-Quran	30%
	3. Dakwah	35%
	4. Pembentukan Karakter	10%
Figur Kiai	1. Kharismatik	15%
	2. Sabar	25%
	3. Sakti	15%
	4. Pintar	30%
	5. Berakhlak Mulia	15%

Kiai menjadi figur yang sangat dihormati oleh santri dan masyarakat sekitar pesantren. Figur kiai selalu menjadi sosok yang dimuliakan karena kiai dianggap mempunyai potensi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat awam. Dengan dasar pada keturunan/trah kiai, kiai kemudian dididik dengan pendidikan khas kiai sehingga masyarakat dan santri yakin bahwa kiai memiliki banyak

kelebihan dalam hal perilaku dan pengetahuan serta *magic*. Sebanyak 30% responden menyatakan kiai memiliki kepintaran. Sebanyak 15% responden mengatakan bahwa kiai itu sakti. Bahkan kesaktian ini yang dipercaya memberikan hegemoni yang luar biasa pada masyarakat dan santri. Ada pemikiran ketika melanggar perintah kiai, maka hidup kita akan celaka. Kemampuan kiai untuk memupuk kepercayaan yang non rasional ini tumbuh subur di daerah Madura, sehingga kiai beserta trahnya menjadi tokoh utama di Madura.

Kampanye Politik Kiai

Politik dalam Pesantren	1. Kampanye Politik	25%
	2. Dakwah	30%
	3. Pendekatan Birokrasi	35%
	4. Pendekatan Masyarakat	10%
Kiai berpolitik	1. Ya	80%
	2. Tidak	20%

Dalam kehidupan pesantren, kiai yang memiliki kharisma dan potensi diuntungkan ketika harus terjun dalam arena pemenangan suara dalam Pilkada. Kepercayaan masyarakat dan santri terhadap sosok kiai tidak dapat dipungkiri, dalam hal ini sangat mendukung kemenangan suara dalam Pilkada. Sebanyak 80% kiai memutuskan untuk berpolitik. Berpolitik untuk para kiai yang sudah memiliki kepercayaan mutlak dari masyarakat dan santri di Madura membuat politisasi kiai sangat berpeluang untuk menang. Kedekatan kiai dengan berbagai kalangan saat melakukan dakwah disinyalir mampu mengokohkan posisi kiai di area pemenangan suara. Hegemoni dan citra kiai yang sangat sakral pada masyarakat Madura terkadang tidak bisa melihat secara rasional jika melihat kiai

adalah manusia biasa. Kiai adalah sama seperti kita yang penuh dengan kekurangan. Sedangkan sisanya 20% kiai memutuskan untuk tidak mengikuti ajang perpolitikan karena menganggap mengasuh santri di pesantren menjadi tanggung jawab utama.

Dakwah yang dilakukan oleh kiai dipermudah melalui kedekatan kiai dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Intensitas pertemuan yang dilakukan oleh kiai dengan berbagai kalangan menjadikan dakwah sebagai salah satu cara dalam pendekatan pemilih. Penguatan citra dan kepercayaan kiai dilakukan bersamaan dengan dakwah yang hampir setiap hari dilakukan. Sebanyak 35% responden mengatakan bahwa pendekatan birokrasi dilakukan oleh kiai dalam perpolitikan. Istilah kenalan dan rekanan menjadi hal yang mutlak perlu dalam kehidupan perpolitikan dan penyebaran pengaruh.

Hasil Pilkada

Hasil Pemenang Pilkada	1. Kiai	75%
	2. Tokoh Masyarakat	10%
	3. Masyarakat	5%
Jenis Pemilihan	1. Terbuka	25%
	2. Tertutup	75%

Dari tabel di atas sangat jelas terlihat mayoritas hasil pemenang Pilkada adalah yang mengusung nama kiai atau dalam hal ini warga pesantren. Tidak dipungkiri, bagi masyarakat Madura, religiusitas dan kharisma seorang kiai melebihi segalanya. Daya magis yang luar biasa mampu mengalahkan pemikiran logis masyarakat akan sosok kiai yang begitu dipuja. Dengan berdasarkan keturunan dan trah, seorang kiai mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara turun temurun. Sebanyak 75%

pemenangan Pilkada berasal dari kiai dan trah kiai. Kepercayaan masyarakat Madura terhadap sosok selain kiai dalam memimpin masyarakat masih belum terlihat. Sosok kiai yang sudah semestinya menjadi pemimpin menjadi kepercayaan yang amat kuat di hati masyarakat.

Pemilihan yang dilakukan di Madura mayoritas adalah pemilihan secara tertutup. Hal ini tidak mengurangi jumlah suara yang sudah diprediksikan sebelumnya bakal mengusung nama dari golongan kiai dan trah kiai. Kepercayaan masyarakat akan tetap mengakar kuat kepada kainya meskipun tanpa adanya suap, *money politic*.

Dampak keterlibatan kiai dalam politik adalah konflik yang mengakar ke bawah. Artinya, jika antar sesama kiai ada konflik atau perselisihan, terkadang konflik itu menurun atau berimbas ke basis massa (*jama'ah*) yang memihak terhadap kiai tersebut. Sebagai contoh, konflik yang berujung kekerasan pada Pilkada di Kabupaten Bangkalan pada 12 Desember 2012. Konflik ini dipicu karena pasangan Kiai Imam Bukhori Kholil dan Zainal Alim tidak diloloskan oleh KPUD Bangkalan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan Pilkada tersebut. Akhirnya, massa pendukung Kiai Imam Bukhori melakukan protes dan menduduki KPUD Bangkalan hingga berujung kekerasan antara warga dengan pihak kepolisian. Bahkan sampai pelaksanaan Pilkada berakhir, buntut konflik tersebut masih diwarnai ketegangan, yaitu dibakarnya gedung perpustakaan Pesantren Ibnu Cholil, yang merupakan pesantren Kiai Imam Bukhori. Secara umum, perselisihan atau sengketa Pilkada di Madura menjadikan kiai-kiai terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada

yang terlibat secara langsung, ada pula yang menentang konflik yang menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, dan ada pula kiai yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Resistensi terhadap kiai/ulama ini membuktikan bahwa pengaruh kiai di sebagian masyarakat telah mengalami kemerosotan. Fakta di atas menunjukkan bahwa terjadi pola hubungan patron-klien yang feodalistik antara kiai dan masyarakat.

Respons Masyarakat

No	Respons Masyarakat	Persentase
1	Setuju	60%
2	Tidak Setuju	10%
3	Biasa Saja	30%

Menjadi pemimpin pesantren yang berpolitik adalah sesuatu yang wajar bagi beberapa kalangan, namun ada juga elemen masyarakat yang mengatakan tidak setuju jika kiai menjadi tokoh politik. Sebanyak 60% masyarakat mengatakan kiai dan ulama itu wajib menjadi pemimpin dalam arena politik. Hal ini karena seorang kiai mempunyai massa besar dan loyal. Selain itu, ketika memilih kiai sebagai pemimpin, responden percaya akan membawa Madura ke arah yang lebih baik. Kiai yang notabene adalah tokoh agama dinilai bersikap jujur, sehingga jauh dari tindakan korupsi. Selain itu, kiai juga dipercaya mempunyai akhlak yang mulia sehingga mampu memimpin dengan bijak.

Berbeda dengan pendapat responden kebanyakan, ada 10% responden mengatakan bahwa menjadi kiai tidak boleh berpolitik. Fungsi kiai adalah pengasuh pesantren dan pemuka agama. Ketika kiai sudah terlibat dalam ranah politik yang sarat dengan pergulatan kepentingan,

uang, dan kedudukan, maka kiai tersebut sudah tidak lagi menjadi kiai yang murni diidamkan oleh masyarakat. Kiai tersebut sudah berada dalam kotak-kotak kepentingan politis yang menginduk pada partai-partai.

Analisis Kharismatik Kiai

Konsep kharismatik Weber tidak lepas dari pembacaan terhadap fenomena-fenomena masyarakat yang gandrung akan pemimpin yang dapat menciptakan suatu perubahan di saat terjadi suatu kondisi krisis. Persoalan yang dikawatirkan terhadap konsep tersebut, yakni apakah konsep kepemimpinan kharismatik yang melekat dapat diturunkan atau diwariskan? Serta sejauh mana peranan kepemimpinan kharismatik dalam melakukan perubahan dalam masyarakat? Dan pada saat apa seorang pemimpin kharismatik itu hadir? Apakah dapat dibentuk secara mekanik atau murni (*pure*)? Oleh karena itu, secara implisit Weber melihat suatu perubahan interaksi sosial masyarakat terdapat faktor eksternal di dalamnya yang mendorong tindakan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dengan bertumpu pada instruksi dari orang yang dipercayai dan dihormati akan menimbulkan serta melahirkan perubahan yang inovatif-dinamis serta radikal.

Ada kecenderungan khusus yang perlu diteliti lebih mendalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial di masyarakat, baik itu menyangkut dunia politik, ekonomi, maupun agama. Salah satu hal penting yang patut diulas lebih mendalam lagi yakni persoalan kepemimpinan kharismatik (*charismatic leadership*). Hal ini penting mengingat peran dunia politik merupakan suatu aturan perma-

inan yang bermain dalam ranah kekuasaan, dan hal itu cukup menjadi hal yang kompetitif dalam masyarakat ketika menyangkut persoalan kekuasaan. Kepemimpinan kharismatik menjadi salah satu faktor khusus yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan seorang pemimpin yang nantinya akan memiliki legalitas-otoritas untuk menentukan suatu kebijakan.

Teori kepemimpinan kharismatik saat ini sangatlah dipengaruhi oleh ide-ide ahli sosial yang bernama Max Weber. Kharisma adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti “berkat yang terinspirasi secara agung atau dengan bahasa lain yakni *anugerah*”, atau dalam bahasa Kristen yakni rahmat (*grace*), seperti kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan, sehingga melahirkan suatu perubahan yang radikal.⁷ Konsep kharismatik (*charismatic*) atau kharisma (*charisma*) menurut Weber lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Menurutnya, ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, yaitu: adanya seorang yang memiliki bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemam-

puan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan.

Melihat definisi di atas, Weber menggunakan istilah itu untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan didasarkan pada tradisi atau otoritas formal tetapi lebih atas persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkati dengan kualitas yang luar biasa. Sebab Menurut Weber, kharisma terjadi saat terdapat sebuah krisis sosial, seorang pemimpin muncul dengan sebuah visi radikal yang menawarkan sebuah solusi untuk krisis itu. Pemimpin menarik pengikut yang percaya pada visi itu, mereka mengalami beberapa keberhasilan yang membuat visi itu terlihat dapat dicapai, dan para pengikut dapat memercayai bahwa pemimpin itu sebagai orang yang luar biasa.

Seorang yang memiliki kharisma merupakan orang yang menciptakan suatu perubahan eksistensial. Namun terkadang, hal itu dianggap sebagai suatu pembaharuan terhadap adat, atau melahirkan perpecahan dunia. Asumsi lain tentang pemimpin kharismatik adalah orang yang dianggap dan dipersepsikan negatif, karena mengadakan keretakan yang dilatarbelakangi oleh sikapnya yang memperlihatkan suatu bentuk kemerdekaan yang baru dan mau tidak mau akan menuntut sebuah ketaatan yang baru, antara seorang pemimpin dengan pengikut.⁸

⁷Konsep kharismatik tersebut sebenarnya memiliki cakupan makna yang cukup luas. Max Weber mendefinisikan konsep kharismatiknya sebagai suatu pengklasifikasian terhadap pola atau tipe otoritas. Tiga macam otoritas tersebut yang dijadikan sebagai postulat atau dalil wujud ideal antara lain tipe kharismatik, tradisional, dan legal-rasional. Lihat, Betti R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 206.

⁸Dalam pemetaan tiga tipe dominasi kekuasaan atau otoritas tersebut terjadi karena faktor sosiologi politik yang menyangkut pada keabsahan kekuatan dan kekuasaan. Sebab bagi Weber, tak ada kekuasaan yang stabil, apalagi kalau kekuasaan tersebut didasarkan pada intimidasi fisik dan kecurangan. Orang-orang akan memercayai kekua-

Tipe kharismatik merupakan salah satu dari tiga tipe yang dikemukakan oleh Weber sebagai postulat ideal dalam memandang peranan pemimpin-pemimpin keagamaan terhadap pola sosial di masyarakat. Apakah mereka juga masuk dalam tipe yang dirumuskan oleh Weber dalam konsep kharismatik, atau malah tidak. Sebenarnya Weber menjadikan tipe otoritas atau sistem kepercayaan yang mengabsahkan hubungan-hubungan dalam masyarakat menjadi tiga, yaitu dominasi hukum (*legal-rasional*), tradisional (*established*), dan kharismatik (pemimpin). Kekuasaan tradisional atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi kuno. Kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (*legal*) adalah kekuasaan yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan untuk mengeluarkan perintah. Kekuasaan tradisional atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi kuno. Dengan kata lain yakni bentuk kepercayaan terhadap legalitas praktik-praktik yang telah disucikan dan dibakukan. Sedangkan kekuasaan kharismatik merupakan dominasi atau otoritas yang didapatkan atas pengabdian diri atas kesucian, sifat kepahlawanan atau yang patut diteladani dan dari ketertiban atas kekuasaannya.

Perbedaan mendasar antara tipe tradisional dan hukum dengan kharisma yaitu terletak pada sifatnya. Tradisional dan hukum merupakan bentuk relasi

yang stabil dan terus menerus (*continue*), sedangkan kharisma murni berusia pendek. Meskipun demikian, seorang pemimpin yang berkharisma itu juga dapat dan bisa mewarisi kekharismaannya kepada orang lain atau istilah Weber rutinisasi kharisma.

Rutinisasi Kharismatik

Seorang pemimpin yang kharismatik sudah memiliki kemampuan untuk mengakomodasi rakyat, karena ia dicintai oleh rakyat. Kehadirannya sudah mendapat restu dari rakyat. Kemudian bagaimana membawa rakyat yang fanatik tersebut ke arah yang lebih baik. Mencoba memperbaiki diri sendiri dan juga mengamalkan apa yang disebutkan nenek moyang dahulu dengan konsep tri dharma, yakni *rumongso melu handarbeni* (merasa ikut memiliki), *rumongso melu hangrukebi* (merasa ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa), dan *mulat sariro hangrosowani* (bersedia untuk selalu mawas diri demi perbaikan di masa datang).

Konsep tri dharma nenek moyang Jawa tersebut signifikan sekali dengan idealitas masyarakat terhadap seorang pemimpin yang diidamkan. Gambaran lain dari konsep pemimpin yang memiliki otoritas dan dianggap kharismatik adalah seorang Nabi atau Paulus. Dalam hal ini, Weber mencoba untuk memetakan yang namanya konsep otoritas, seperti halnya yang dipegang oleh Paulus. Dalam tesisnya, Weber menyatakan bahwa yang namanya kekuasaan, seperti Paulus, yakni memaksakan kehendak atau hasrat personal terhadap orang lain meskipun hal demikian mendapat perlawanan. Ketika teori otoritas tersebut yang dicontohkan terhadap otoritas Paulus,

san (menaati) tersebut kalau memiliki alasan-alasan yang legal atas kekuasaantersebut. lihat, Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam; Suatu Telaah Analistis atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G. A. Ticoalu (Jakarta: CV. Rajawali, 1974), hlm. 36-37.

KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman
Vol. 23 No. 2, Desember 2015:208-220
Copyright (c) 2015 by Karsa. All Right Reserved
DOI: 10.19105/karsa.v23i2.719

dan diterapkan dalam ranah agama, ternyata hal itu cukup memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir penganut Agama Kristen. Baik itu berdampak positif maupun negatif. Sebab, diantara *mainstream* dalam agama tersebut terdapat yang menerapkan apa yang dikatakan Weber "otoritas".⁹

Kembali kepada sub awal yakni mengenai rutinisasi kharismatik, hal itu dapat terjadi mengingat sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin kharismatik dapat ditransformasikan. Semua itu biasa dilakukan dengan cara memindahkan kharisma kepada seorang penerus yang ditunjuk melalui tata cara dan upacara tertentu, sesuai kesepakatan awal dari masyarakat atau organisasi terkait. Namun, kemungkinan jarang menemukan seorang penerus bagi pemimpin yang luar biasa. Selanjutnya, banyak alasan mengapa seorang pemimpin kharismatik bisa segan untuk cukup dini mengidentifikasi seorang penerus yang kuat untuk memastikan transisi yang mulus. Alasan yang mungkin meliputi mekanisme pertahanan (misalnya, pemimpin menghindari memikirkan kematian atau pensiun), terlalu asyik dengan misi, dan ketakutan akan rival yang potensial.

Menurut Weber, akan muncul kepercayaan di kalangan para anggotanya terhadap adanya kharisma warisan atau adanya kharisma jabatan. Konsepsi mengenai sifat-sifat pribadi itu di sini merupakan transformasi yang berubah menjadi konsepsi yang bisa disalurkan, me-

lalui kekuatan immaterial-supranatural yang bisa menerangi orang biasa dan memberikan otoritas kepadanya. Contoh kharisma warisan adalah pemilihan beberapa orang khalifah pertama dalam Islam dari kalangan keturunan Nabi Muhammad, sedangkan contoh kharisma jabatan adalah pengembalian jabatan kepausan dalam agama Kristen di Barat.

Dalam rutinisasi kharisma ini, pandangan Weber bisa terbilang pesimis, ketika menilai bahwa sifat kharismatik hanya terdapat pada proses permulaannya dan nanti ketika pemimpin tersebut meninggal, maka kharisma tersebut akan beralih menjadi persolan. Bagi Weber, tanda-tanda nyata otoritas bukanlah sebagian bentuk dari kharisma murni atau tulen, tapi yang dikatakan Weber sebagai kharisma murni adalah pengabdian kepada orang dan bukan dari peluang-peluang kemukjizatan atau magikal orangnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa terdapat disharmonis antara kharisma buatan dan murni. Kharisma buatan didasarkan pada kepentingan atas pekerjaan, sedangkan kharisma murni lebih menitikberatkan kepada pengabdian pada seseorang.

Penutup

Fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan naiknya kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru, akan tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di Pulau Madura. Oleh karena itu, dari pasca reformasi ini dapat dikatakan bahwa keterlibatan kiai-kiai di Madura dalam politik praktis mengalami peningkatan yang signifikan

⁹Zulkarnain, *Rasionalisasi dan Orientasi Agama (Menguraikan Signifikansi Agama terhadap Pola Hidup Manusia)*, makalah dipresentasikan dalam Materi Kuliah Sosiologi pada Jur. Perbandingan Agama, Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, hlm. 3-4.

Respons masyarakat terhadap politisasi pesantren memang terlihat masih mendukung sepenuhnya bagi kiai untuk berpolitik. Dengan kondisi Madura yang menjadikan kiai menjadi sentral kehidupan religiusitas, menjadi hal yang wajar hal tersebut terjadi. Namun sebagian masyarakat yang mempertanyakan kemurnian visi misi kiai menjadi duta politik patut untuk dipertimbangkan, mengingat kiai menjadi aktor utama yang mempunyai nama besar di Madura. Rasionalitas dalam sendi-sendi kehidupan sosial dan politik akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Masyarakat akan semakin banyak belajar dan berpikir rasional tentang figur seorang pemimpin di Madura. Citra pemimpin yang berasal dari kelompok kiai dan pesantren harus selalu dijaga agar tidak kehilangan kepercayaan oleh khalayak yang menjadi modal utama dalam perolehan suara. Normatif menjadi hal yang akan dikaji ulang oleh masyarakat Madura untuk ke depannya. Menjadi kiai yang mampu mengajarkan ilmu agama dan berdakwah melalui politik bukan politik dakwah untuk kepentingan kroni dan rekanan adalah hal yang paling diidamkan oleh masyarakat.[]

Daftar Pustaka

- Aripudin, Acep. *Sosiologi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Farhan, Hamdan dan Syarifudin. *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Rosdakarya, 1999.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Prasodjo, Sudjono. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3S, 1982
- Rais, M. Amien. *Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 2001.
- Rush, Michael & Althof, Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Scharf, Betti R. *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Sholichin, Mohammad Muchlis. "Perilaku Politik Kiai di Pamekasan," *Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. XV No. 1, April, 2009.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analistis atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G. A. Ticoalu. Jakarta: CV. Rajawali, 1974.
- Zada, Khamami. "NU, Politik, dan Khidmat Umat" dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kene-garaan*, ed. Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. Jakarta: Kompas, 2010.
- Zulkarnain. *Rasionalisasi dan Orientasi Agama : Menguraikan Signifikansi Agama terhadap Pola Hidup Manusia*. Makalah dipresentasikan dalam Materi Kuliah Sosiologi pada Jur. Perbandingan Agama, Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

